



2022

# POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika  
Vol.4 No.1, 2022

## PERAN BUDAYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN WISATA

Eva Rachmawati<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan  
Email: eva.rachmawatisolihin@gmail.com, vea@apps.ipb.ac.id

### Isu Kunci

- Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing.
- Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan wisata merupakan suatu proses yang tergantung pada konteks atau kondisi masyarakat.
- Belum adanya kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata yang mengakomodir keberagaman tersebut.
- Ketiadaan kebijakan ini menyebabkan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi tidak bisa mencapai seluruh kelompok masyarakat dan mereka menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari pengembangan wisata tersebut.

### Ringkasan

*Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan wisata berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang context-dependent, dimana perencanaan dan pelaksanaannya seharusnya tergantung pada kondisi masyarakat dimana program tersebut dilaksanakan. Dari kondisi tersebut, maka terlihat bahwa budaya yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan norma yang berlaku di masyarakat ternyata memang dapat menjadi faktor penghambat dari pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dalam konteks wisata. Adanya penerapan aturan dan norma masyarakat umumnya terjadi karena tidak adanya kebijakan dari pemerintah. Atau walaupun ada, peraturan tersebut belum mengakomodir keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk merancang peraturan kebijakan yang mengakomodir keberagaman tersebut.*

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Pariwisata berkelanjutan dicapai ketika masyarakat lokal memiliki kendali atas proses pembangunan, dan mereka berbagi secara adil dalam manfaat yang muncul dari kegiatan pariwisata (Scheyvens dan Scheyvens 2015). Masyarakat lokal merupakan pemangku kepentingan yang paling terpengaruh oleh pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar dapat memutuskan mana yang terbaik untuknya. Pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan kapasitas komunitas untuk membuat pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan (Alsop dan Heinsohn, 2005; Timothy 2007). Dengan cara ini, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai hasil (seseorang atau kelompok diberdayakan) dan / atau proses (memberdayakan kelompok atau individu) (Alsop dan Heinsohn 2005; Timothy 2007). Hasil penelitian Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat mungkin belum sepenuhnya sesuai dalam konteks Indonesia dalam dan melalui pengembangan pariwisata. Ini mungkin karena konsep tersebut tidak cukup memperhitungkan faktor budaya dalam memberikan hasil pemberdayaan melalui pariwisata. Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa proses dan hasil pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya masyarakat dalam hal ini nilai-nilai yang dianut dan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat kadang kala dapat menghambat pemberdayaan masyarakat dan pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan, adat dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat, kadang kala menghalangi kelompok masyarakat tertentu untuk terlibat dalam pariwisata atau perencanaan pariwisata.

### Urgensi

Indonesia memiliki banyak daya tarik potensial untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan Indeks TTCI, di antara Negara-negara Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-6 untuk keunggulan sumber daya alam, dengan beberapa situs alam Warisan Dunia selain kekayaan keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain, Indonesia juga kaya akan sumber daya budaya (peringkat 38 dari 140) (Blanke dan Chiesa, 2013), menyebabkan upaya pemberdayaan masyarakat akan lebih menantang. Untuk menentukan strategi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia dengan budaya dan lokasi yang beragam, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya masyarakat dan keliling mempengaruhi proses dan hasil pemberdayaan masyarakat secara lebih rinci. Temuan penelitian dapat membantu peneliti, praktisi pembangunan, dan pengambil keputusan dalam merencanakan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam pengembangan pariwisata pada karakteristik masyarakat tertentu (Blanke dan Chiesa, 2013).

### Tujuan

Menganalisis pengaruh budaya terhadap proses pemberdayaan masyarakat

### Ikhtisar (*Overview*)

Terkait dengan budaya, beberapa nilai budaya menghambat pemberdayaan masyarakat, antara lain *in-group*, *out-group*, nilai-nilai budaya ascribed, kolektivisme berpadu dengan nilai-nilai kekeluargaan, kolektivisme yang dipadukan dengan komunikasi terselubung, budaya konteks tinggi, budaya harmoni, budaya jarak kekuasaan tinggi, budaya formal, 'penghindaran ketidakpastian,' dan mengikuti tradisi. Budaya masyarakat juga menyebabkan sebagian anggota kelompok masyarakat (misalnya perempuan, etnik tertentu) menjadi terpinggirkan karena budaya tersebut

membatasi mereka untuk terlibat dalam semua aspek perencanaan dan pengembangan pariwisata. Dari segi norma, norma yang diterapkan dalam masyarakat terindikasi dapat membatasi anggota masyarakat tertentu untuk terlibat dalam pariwisata. Meskipun tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar norma, sebagian besar anggota masyarakat akan mengikuti 'aturan' karena 'sistem kehormatan'.

## Hasil dan Pembahasan

Budaya lokal dapat menjadi sumber daya untuk pariwisata yang berkelanjutan, khususnya untuk pariwisata berbasis masyarakat (Giampiccoli dan Hayward Kalis 2012). Namun bahkan dalam konteks di mana masyarakat mengontrol dan 'memiliki' perkembangan pariwisata, realitas lokal yang dicirikan oleh struktur kekuasaan yang berbeda dan norma budaya dan nilai masih dapat membatasi perkembangannya dan pembagian keuntungan secara adil (Dolezal 2015; Walpole dan Goodwin 2000). Misalnya, di Indonesia, sebagian besar masyarakat mengikuti cara hidup tradisional tertentu yang disebut "adat". Istilah 'adat' mengacu pada adat, tradisi, aturan, atau praktik yang memandu kehidupan sosial dan pengambilan keputusan dalam masyarakat Indonesia. Sistem hukum berbasis etnis menguraikan kewajiban dan harapan untuk hubungan sosial dan ekonomi (Alison dan Nobles 2009; Forshee 2006). Adat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Bagi kebanyakan orang Indonesia, adat adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, termasuk interaksi sosial sehari-hari, dan penegakan hukum. Selain itu, adat memberikan kohesi pada kehidupan setelah berabad-abad pemaksaan dan perubahan yang mengganggu (Forshee 2006).

Penelitian Rachmawati (2018) mengindikasikan bahwa budaya, khususnya nilai

dan norma budaya dari berbagai kelompok dalam suatu masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk peluang pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata. Hasil ini mendukung apa yang telah dilaporkan oleh para peneliti lain yang menyampaikan bahwa pemberdayaan merupakan fenomena spesifik lokasi dan bergantung pada konteks (Ayscue *et al.* 2016; Cole 2007; Dolezal 2015; Giampiccoli dan Hayward Kalis 2012; Maruyama *et al.* 2016; Moscardo *et al.* 2013).

Hasil penelitian (Rachmawati 2018) tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dapat membatasi pemberdayaan masyarakat. Budaya tersebut seolah-olah menghambat kelompok masyarakat tertentu untuk terlibat dalam pariwisata dan perencanaannya. Beberapa nilai budaya yang menghambat pemberdayaan masyarakat adalah *in-groups* dan *out-groups*, kolektivisme yang dipadukan dengan nilai-nilai kekeluargaan, kolektivisme yang dipadukan dengan komunikasi terselubung, budaya konteks tinggi, budaya harmoni, budaya jarak kekuasaan tinggi, budaya formal, "penghindaran ketidakpastian", dan mengikuti tradisi. Untuk budaya collectivism, sebenarnya juga dapat menjadi faktor yang mendorongnya upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata dapat tercermin dalam peningkatan aksi kolektif untuk mengatasi kebutuhan atau kepentingan kelompok secara kolektif (Knight dan Cottrell 2016). Namun, ini merupakan tantangan untuk diterapkan dalam komunitas yang terdiri dari banyak kepentingan atau kelompok etnis, atau dalam komunitas multikultural dengan nilai kolektivisme yang kuat seperti yang banyak terlihat di masyarakat Indonesia. Dalam budaya kolektif yang kuat, anggota masyarakat lebih peduli tentang kebaikan kelompok dalam yang mereka identifikasi (misalnya, keluarga, teman, tetangga, kelompok kerja), yang juga melibatkan pengakuan kelompok luar. Budaya "*in-groups*

*and out-groups*” menekankan perbedaan yang jelas antara mereka yang tergabung dalam suatu kelompok dan mereka yang tidak, yang seringkali membatasi siapa yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan keputusan kelompok tertentu (Batson *et al.* 2002; Reisinger dan Turner 2003). Kondisi ini menjadi problematis jika perhatian untuk memenuhi kebutuhan anggotanya mengarah pada ketidakpedulian terhadap kebutuhan non-anggota (Batson *et al.* 2002).

Selain nilai budaya, norma yang berlaku di masyarakat juga kadang-kadang membatasi kelompok masyarakat tertentu dari pemberdayaan melalui pengembangan pariwisata. Seperti halnya dengan budaya, norma ini juga biasanya muncul karena kebiasaan dan sejarah masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Moscardo *et al.* (2013), dalam jangka panjang, norma sosial mengendalikan perilaku masyarakat dan mengendalikan keterlibatan warga dalam pariwisata berbasis masyarakat.

Implementasi budaya dan norma tradisional ini terkait dengan tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur kesempatan (*opportunity structure*) masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan wisata. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak memiliki peraturan khusus yang berkaitan dengan “desa perkebunan”. Akan tetapi, kemudian masyarakat membuat semacam norma atau aturan tersendiri yang membedakan antara desa biasa pada umumnya, dengan desa perkebunan. Pada akhirnya, penerapan norma tersebut mengakibatkan penduduk desa yang tinggal di desa perkebunan dan juga pemerintah desanya tidak dapat terlibat dalam industri pariwisata dan juga proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa karena desa tersebut merupakan desa perkebunan, maka fokus pengembangannya adalah kea rah perkebunan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Setiawan dan Kusmawan

(2016) yang menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia, khususnya di tingkat desa, tidak melihat keragaman masyarakat Indonesia yang menyebabkan marginalisasi kelompok yang kurang beruntung (misalnya, kurangnya akses untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan) dan sumber daya lainnya di desa). Implikasi dari hasil ini adalah, dalam merancang regulasi, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Implikasi ini sesuai dengan saran yang disampaikan oleh para peneliti lainnya (Alsop dan Heinsohn 2005; Cao 2015; Carson *et al.* 2014; Macbeth *et al.* 2008; Mehring *et al.* 2011).

## Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks wisata dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat dimana program tersebut dilaksanakan. Kebudayaan, disatu sisi dapat mendukung pencapaian tujuan wisata berkelanjutan, akan tetapi disisi lain juga dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat, budaya dan tradisi yang semuanya memiliki ciri dan karakter masing-masing. Oleh karena itu, dalam Menyusun regulasi atau kebijakan yang terkait dengan masyarakat, pemerintah atau penyusun kebijakan harus dapat memahami keberagaman dan karakteristik tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan atau peraturan yang diimplementasikan dapat mengakomodir kepentingan dari semua kelompok masyarakat tersebut.

## Daftar Pustaka

Alison, M. B., & Nobles, J. (2009). Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. *Population Studies*.

- 63(3), 277–294.  
<https://doi.org/10.2307/40646425>
- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators. World Bank Policy Research Working Paper 3510.
- Ayscue, E. P., Boley, B. B., Maruyama, N., & Woosnam, K. M. (2016). Testing for gender discrepancies using the Resident Empowerment through Tourism Scale.
- Batson, C. D., Ahmad, N., & Tsang, J. (2002). Four motives for community involvement. *Journal of Social Issues*. 58(3), 429–445.
- Blanke, J., & Chiesa, T. (2013). The travel & tourism competitiveness report 2013: reducing barriers to economic growth and job creation. World Economic Forum.
- Cao, X. (2015). Challenges and potential improvements in the policy and regulatory framework for sustainable tourism planning in China: The case of Shanxi Province. *Journal of Sustainable Tourism*. 23(3), 455–476.  
<https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957207>
- Carson, D. A., Carson, D. B., & Hodge, H. (2014). Understanding local innovation systems in peripheral tourism destinations. *Tourism Geographies*. 16(3): 457–473.  
<https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868030>
- Cole, S. (2007). Beyond authenticity and commodification. *Annals of Tourism Research*. 34(4): 943–960.  
<https://doi.org/doi:10.1016/j.annals.2007.05.004>
- Dolezal, C. (2015). Questioning empowerment in community-based tourism in rural Bali: Vol. Doctor of. the University of Brighton.
- Forshee, J. (2006). Culture and Customs of Indonesia. Greenwood Publishing Group.
- Giampiccoli, A., & Hayward Kalis, J. (2012). Community-based tourism and local culture: the case of the amaMpondo.
- Knight, D. W., & Cottrell, S. P. (2016). Evaluating tourism-linked empowerment in Cuzco, Peru. *Annals of Tourism Research*. 56: 32–47.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2015.11.007>
- Macbeth, J., Carson, D., & Northcote, J. (2008). Social capital, tourism and regional development: SPCC as a basis for innovation and sustainability. *Current Issues in Tourism*. 7(6): 502–522.  
<https://doi.org/10.1080/1368350050408668200>
- Maruyama, N. U., Woosnam, K. M., & Boley, B. B. (2016). Residents' attitudes toward ethnic neighborhood tourism (ENT): perspectives of ethnicity and empowerment. *Tourism Geographies*: 1–22.  
<https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1258432>
- Mehring, M., Seeberg-Elverfeldt, C., Koch, S., Barkmann, J., Schwarze, S., & Stoll-Kleemann, S. (2011). Local institutions: Regulation and valuation of forest use—Evidence from Central Sulawesi, Indonesia. *Land Use Policy*. 28(4): 736–747.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.01.001>
- Moscardo, G., Schurmann, A., Konovalov, E., & McGehee, N. G. (2013). Using tourism to build social capital in communities: New pathways to sustainable tourism futures.
- Rachmawati, E. (2018). Tourism and community empowerment: Critical insights from Indonesia [Lincoln University]. <http://researcharchive.lincoln.ac.nz/handle/10182/11036>
- Reisinger, Y., & Turner, L. W. (2003). Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Elsevier.
- Scheyvens, R., & Scheyvens, R. (2015). Ecotourism and the Empowerment of Local Communities Ecotourism and the

empowerment of local communities.  
Tourism Management.

Timothy, D. J. (2007). Empowerment and Stakeholder Participation in Tourism Destination Communities. In A. C. and T. Coles (Ed.), *Tourism, power and space* (pp. 199–216). Routledge.

Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*. 27(3): 559–576.

[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00088-2](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00088-2)



**Direktorat  
Publikasi Ilmiah  
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

**Penyunting**

Eva Anggraini  
Alfian Helmi

**Tata letak:**

Rizal Gusdinar  
Bintang Aditia Tri Wibowo

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University  
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680  
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

